

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pertanggungjawaban media yang teratur memungkinkan organisasi untuk mengungkapkan pencapaian atau kegagalan dalam menggapai tujuan dan target yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga mencerminkan prinsip akuntabilitas (Hantono et al. 2021). Indonesia telah memasuki masa penguatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pihak termasuk pemerintah dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha menguatkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance* (kemenkopmk.go.id).

Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah yang memiliki hak otonomi diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan menjadi fokus utama bagi aparat pemerintah Kabupaten Madiun. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat membantu pengguna informasi dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja

keuangan aktual dengan standar akuntansi, mengevaluasi kondisi keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan perundangan yang relevan, serta menilai tingkat efisiensi dan efektivitas (Marit et al., 115:2021).

Pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan agar laporan keuangannya semakin baik. Upaya ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari peningkatan prosedur pengelolaan keuangan hingga penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat. Dalam pengawasan laporan keuangan instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan pentingnya memastikan kualitas informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dianggap relevan ketika memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan pengguna (Prasetyo, 2022). Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan mencakup pihak-pihak seperti masyarakat, investor, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya. Dengan menyediakan informasi yang relevan, laporan keuangan dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan sekarang, serta meramalkan masa yang akan datang (Irawati et al., 2019; Rompas, 2022). Informasi yang disajikan juga memiliki peran penting dalam mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Dengan melihat informasi terkini dalam laporan keuangan, pemerintah dan pihak terkait dapat memperbaiki dan mengoreksi kebijakan serta strategi keuangan yang telah diterapkan sebelumnya (Antoni, 2014).

Hal ini menjadi krusial dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks relevansi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh informasi dalam laporan keuangan. Pertama, informasi

harus memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi pengguna. Dengan kata lain, informasi tersebut harus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan, risiko, dan potensi keberlanjutan (Sukmaningrum & Harto, 2012). Kedua, informasi harus memiliki manfaat prediktif, yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meramalkan masa depan. Selanjutnya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu. Keterlambatan dalam penyampaian informasi dapat mengurangi nilai relevansinya karena pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi yang aktual untuk membuat keputusan yang tepat (Hardiyanto, 2014). Terakhir, informasi harus lengkap, yaitu mencakup semua aspek yang relevan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan keuangan instansi pemerintah. Dalam rangka mencapai laporan keuangan yang lebih baik dan relevan, Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan dan pengawasan.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan adanya beberapa ciri kualitatif. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan mengamankan beberapa persyaratan kualitatif yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Beberapa di antaranya mencakup relevansi (*relevance*), keandalan (*reliability*), perbandingan yang memungkinkan (*comparability*), dan kemampuan pemahaman (*understandability*). Apabila laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi ketiga karakteristik kualitatif yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi

peningkatan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan memiliki SDM yang kompeten, pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan profesional, efektif, dan efisien. Pentingnya keberadaan SDM yang memiliki kemampuan yang handal tidak bisa diremehkan karena akan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan. Laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan SDM menjadi faktor yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa laporan keuangan berkualitas terwujud, karena tidak hanya sekedar memiliki SDM, tetapi juga harus memiliki tingkat kompetensi yang tinggi (Rahman & Permatasari, 2021).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya perbedaan sistem dan kebijakan akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah, rendahnya kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data oleh pemerintah daerah, serta kurangnya integrasi antara Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang mengakibatkan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual dan kendala pada sumber daya manusia. Situasi ini memiliki dampak yang dirasakan pada kualitas laporan keuangan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dalam konteks ini, permasalahan tersebut dapat berdampak negatif pada kualitas laporan keuangan. Perbedaan sistem dan kebijakan akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ketidaksesuaian dalam metode pengukuran, pengakuan, dan penyajian informasi keuangan. Hal ini dapat

menghasilkan laporan keuangan yang tidak konsisten dan sulit untuk dibandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Rendahnya kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data oleh pemerintah daerah juga merupakan hambatan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Ketidaktersediaan data secara tepat waktu dapat menyebabkan penundaan dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keandalan dan akurasi informasi yang disajikan. Laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ketidakintegrasian antara SPAN dan SIKD juga menjadi faktor yang memperlambat penyusunan laporan keuangan. Ketergantungan pada proses manual dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data keuangan dapat meningkatkan risiko kesalahan dan menghabiskan waktu yang berharga. Selain itu, hal ini juga dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Mengatasi permasalahan ini, penting untuk mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan standar ini, penyusunan laporan keuangan daerah dapat diperbaiki secara signifikan. Laporan keuangan yang dihasilkan akan memenuhi kualitas yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara

pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan sistem akuntansi yang seragam. Selain itu, perlu juga dilakukan investasi dalam pengembangan SIKD yang terintegrasi dengan SPAN, sehingga proses pengumpulan dan penyajian data keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah akan menjadi alat yang efektif untuk mengukur kinerja keuangan dan transparansi, serta memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat tata kelola keuangan publik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto (2020), terungkap bahwa peningkatan tingkat penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan secara positif akan meningkatkan kualitasnya. Langkah untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah adalah dengan melakukan pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Dalam rangka mengatur akuntansi tersebut, kebijakan akuntansi digunakan untuk memastikan konsistensi dalam penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Dari penjelasan di atas, Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan melalui peran yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia, implementasi standar akuntansi

pemerintahan, serta sistem akuntansi keuangan daerah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kajian Penelitian terdahulu, dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam memposisikan permasalahan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan sebelumnya tentu memiliki peranan besar dan peranan penting yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis bagi penelitian ini, antara lain;

Dalam studi Karsana dan Suaryana (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat meningkat secara positif dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperbaiki sistem pengendalian intern. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, ketika ketiga variabel ini digabungkan secara lengkap, diharapkan laporan keuangan dapat memenuhi standar yang diinginkan. Pada penelitian kedua, yang dilakukan oleh (Ningtyas & Widyawati, 2015), disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,024, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05, dan analisis regresi menghasilkan koefisien sebesar 0,622. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa penggunaan standar akuntansi pemerintahan secara efektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ketiga, yang dilakukan oleh (Kusnandi dkk, 2022), ditemukan bahwa ada hubungan antara kompetensi aparatur pemerintah, teknologi informasi, dan pengendalian internal keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kompetensi aparatur pemerintah mempengaruhi penggunaan teknologi informasi yang ada, yang kemudian berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pengendalian internal yang efektif. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Pujanira & Taman, 2017), terdapat keterkaitan yang positif antara Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan tenaga kerja dan implementasi standar akuntansi pemerintahan memainkan peran penting dalam menentukan mutu pelaporan keuangan pemerintah lokal.

Dalam penelitian kelima mereka, Eman dkk. (2022) menemukan bahwa meskipun Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif, dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan tidak signifikan. Begitu pula dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, meskipun memiliki pengaruh positif, namun tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh gabungan yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini melibatkan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di tingkat Pemerintah Daerah sebagai subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini berbeda dari segi teori dan indikator yang digunakan, serta lokasi penelitian di wilayah Pemerintah Kabupaten Madiun.

Namun, berdasarkan beberapa pendukung signifikan di atas yang menunjukkan hasil yang bertentangan, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) justru menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mereka menemukan bahwa meskipun standar akuntansi yang tepat diterapkan, laporan keuangan masih belum mencerminkan kualitas yang baik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) juga menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa meskipun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tersedia, hal tersebut tidak menjamin laporan keuangan yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalumata (2016) juga mendukung temuan ini, dimana ia menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, meskipun organisasi pemerintah memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, hal tersebut tidak menjamin terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Seiring dengan penelitian Sanjaya (2017), yang menyatakan bahwa faktor individual seperti kepribadian individu memiliki

pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya manusia memiliki kompetensi yang memadai, tetapi jika kepribadian individu yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan tidak tepat atau tidak memenuhi standar profesionalitas, maka kualitas laporan keuangan akan terpengaruh secara negatif.

Kesimpulannya, meskipun beberapa penelitian mendukung hubungan antara standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016), Kalumata (2016), dan Sanjaya (2017) menyajikan argumen yang berbeda. Mereka menemukan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara faktor individual seperti kepribadian individu memainkan peran yang lebih penting. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang mendalam untuk mengungkap faktor-faktor yang secara nyata memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun?
2. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun?
3. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk :

- a. Mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- b. Mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- c. Mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Madiun.

b. Manfaat Untuk Pemerintah Daerah

- 1) Sebagai evaluasi atau saran untuk efektivitas dan kualitas laporan keuangan kedepan yang lebih baik lagi.
- 2) Meningkatkan kredibilitas Pemerintah Daerah pada laporan keuangan.

c. Manfaat Untuk Peneliti

Meningkatkan kemampuan penulis dalam mengangkat suatu fenomena yang terjadi pada laporan keuangan, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor perusahaan.

d. Manfaat Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan atau rujukan, sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan dalam materi atau studi kasus lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil laporan keuangan.

